

**ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
JAGUNG KUNING MELALUI POLAKEMITRAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO**

*THE ANALYSE TO INCREASING EARNING FARMER MAIZE OF
YELLOW TURN BY SOCIETY COLLABORATION PATTERN IN
KELARA DISTRICT OF JENEPONTO REGENCY*

Nirmala Syuaib



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN
PETANI JAGUNG KUNING MELALUI POLA KEMITRAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ekonomi Sumberdaya

Disusun dan diajukan oleh

NIRMALA SYUAIB

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

Tesis

**ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
JAGUNG KUNING MELALUI POLA KEMITRAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diajukan oleh

NIRMALA SYUAIB
Nomor Pokok P0400201007

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 7 Agustus 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S
Ketua

Ketua Program Studi
Ekonomi Sumberdaya

Dr. I Made Benyamin, M.Ec

Dr. Ir. Rahim Darma, M.S
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof.DR.Dr.A.Razak Taha, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NIRMALA SYUAIB

Nomor Mahasiswa : P0400201007

Program Studi : Ekonomi Sumberdaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2006

Yang menyatakan

NIRMALA SYUAIB

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan para petani jagung kuning yang bekerja dengan sekuat tenaga, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan minimum mereka. Penulis bermaksud menyumbangkan beberapa konsep untuk mengangkat kondisi kehidupan mereka yang umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan ke taraf yang lebih layak.

Penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S dan Dr. Ir. Rahim Darma, M.S atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian ini, pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bupati Kabupaten Jeneponto atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan studi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Koperasi dan PKM, Kepala Biro Pusat Statistik dan Kepala Kantor Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada imran, nira, adi, murni, erna, erlin, erwin, nir, wati, neno, enal, irma dan mereka yang namanya tidak tercantum yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Akhirnya hasil karya ini, penulis persembahkan secara khusus kepada

ayahanda **Syuaib** dan ibunda **Nurbaya** atas segala doa, motivasi dan bantuannya baik moril maupun materil .

Penulis menyadari sepenuhnya dalam tesis ini masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan pada penulis, maka dengan segala kerendahan hati kritikan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Makassar, Agustus 2006

Nirmala Syuaib

ABSTRAK

NIRMALA SYUAIB. *Analisis Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Melalui Pola Kemitraan Masyarakat di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto* (dibimbing oleh Didi Rukmana dan Rahim Darma)

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan tujuan mengetahui (1) usahatani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat, dan (2) perbedaan tingkat pendapatan petani jagung kuning sebelum dan sesudah bermitra.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dengan mewawancarai tiga puluh petani sebagai responden dan diambil secara acak sederhana dari lima belas desa dan kelurahan yang dianggap representatif dan dapat mewakili lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis keuntungan, dan analisis regresi linear.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pola kemitraan antara pedagang/pengusaha dengan petani jagung kuning adalah pola kemitraan sederhana (pemula); (2) Terdapat perbedaan tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah bermitra dengan selisih pendapatan sebesar Rp. 47.585 per musim tanam per hektar. Faktor umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas garapan, pengalaman bertani dan pengalaman bermitra berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat. Dari beberapa variabel tersebut yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat yakni variabel pendidikan, luas garapan dan pengalaman bermitra.

ABSTRACT

NIRMALA SYUAIB. The Analyse to increasing of earning farmer Maize of Yellow turn by society collaboration Pattern in Kelara district of Jeneponto regency (Supervised by Rukmana and Rahim Darma).

This Research is done in Kelara district of Jeneponto regency, purpose to know (1) Effort farmer maize of yellow turn by society collaboration pattern and (2) different of level earning farmer yellow turn before and after collaboration.

Used method of this research is field survey with interview thirty farmer as respondent and the sampel of take by random from fifteen village and chief of village as representative and can be deputizing research location. Analysed data using by descriptive, advantage and regression linear.

The result of research indicated : (1) That collaboration pattern between entrepreneur with yellow turn farmer are simple collaboration pattern; (2) Available different of earning level farmer before and after collaboration with earnings difference of equal is Rp. 47.585 per season plant per hectare. Factor of Age, education, sum of responsibility family, wide area, experience farmer and experience to collaboration have earning level yellow turn farmers through society collaboration pattern. From some the variable is signifikan to increasing of earnings of maize farmer yellow through partner pattern namely education variable, wide of tilled and experience have partner.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kemitraan Usahatani	12
B. Pola Kemitraan: Aspek Legal, Ekonomi dan Manajemen	22
C. Pengembangan Kemitraan Masyarakat Dalam Usahatani	32
D. Manfaat Bermitra Dalam Usahatani	44
E. Karakteristik Petani	49
F. Analisis Keuntungan	55
G. Kerangka Konseptual	57

H. Hipotesis	61
I. Definisi Operasional	61
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
C. Populasi dan Teknik Sampel	64
D. Instrumen Pengumpulan Data	65
E. Analisis Data	66
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	69
B. Keadaan Umum Responden	91
C. Analisis Usahatani Jagung Kuning dalam Pola Kemitraan Masyarakat	100
D. Hasil Estimasi Model Regresi Linear Pendapatan Petani Jagung Kuning Pola Kemitraan Masyarakat	132
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

nomor	<i>Teks</i>	halaman
1.	Perkembangan luas panen dan produksi jagung di Sulawesi Selatan	3
2.	Perkembangan luas panen dan produksi jagung pada lima daerah sentra produksi utama Sulawesi Selatan	4
3.	Perkembangan usahatani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto	7
4.	Luas wilayah kecamatan kelara menurut desa/kelurahan	71
5.	Klasifikasi ketinggian wilayah dari permukaan air laut	71
6.	Jumlah curah hujan bulanan lima tahun terakhir	74
7.	Luas potensi tanah pertanian menurut penggunaannya di Kecamatan Kelara	76
8.	Penduduk Kecamatan Kelara menurut kelompok umur dan jenis kelamin	78
9.	Perkembangan penduduk Kecamatan Kelara lima tahun terakhir	78
10.	Kepadatan penduduk Kecamatan Kelara lima tahun terakhir	79
11.	Jumlah penduduk Kecamatan Kelara menurut angkatan kerja	80
12.	Jumlah penduduk usia angkatan kerja Kecamatan Kelara menurut lapangan usaha	81
13.	Jumlah penduduk Kecamatan Kelara menurut tingkat pendidikan	82
14.	Panjang jalan menurut kewenangan dan jenis permukaan Kecamatan Kelara	83
15.	Keadaan kelembagaan pertanian Kecamatan Kelara	86

16. Lembaga ekonomi Kecamatan Kelara	87
17. Jumlah dan jenis alat mesin pertanian Kecamatan Kelara	89
18. Luas panen, produksi dan rata-rata produksi intensifikasi khusus jagung kuning Kecamatan Kelara	90
19. Distribusi responden menurut kelompok umur	92
20. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan	93
21. Distribusi responden menurut jumlah tanggungan keluarga	95
22. Distribusi responden menurut pengalaman bertani	97
23. Distribusi responden menurut luas garapan	98
24. Distribusi responden menurut pengalaman bermitra	100
25. Tanggapan positif responden terhadap etika bisnis dalam kemitraan Masyarakat di Kecamatan Kelara	117
26. Rata-rata biaya variabel petani responden sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara	124
27. Rata-rata biaya tetap petani responden sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara	125
28. Rata-rata total biaya produksi petani responden sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara	125
29. Rata-rata penerimaan petani responden sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara	127
30. Rata-rata keuntungan petani responden sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara	128
31. Perbedaan tingkat pendapatan petani responden sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara	129
32. Hasil estimasi model regresi linear pendapatan petani responden pola kemitraan masyarakat di Kecamatan Kelara	133

DAFTAR GAMBAR

nomor	<i>Teks</i>	halaman
1.	Kerangka konseptual penelitian analisis peningkatan pendapatan petani jagung kuning pola kemitraan masyarakat di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	60
2.	Skema kemitraan yang sedang berlangsung	120
3.	Skema pola kemitraan harapan	122

DAFTAR LAMPIRAN

nomor	<i>Teks</i>	halaman
1.	Data responden	146
2.	Biaya yang dikeluarkan oleh petani responden sebelum bermitra	147
3.	Biaya yang dikeluarkan oleh petani responden sesudah bermitra	148
4.	Pendapatan usahatani responden sebelum bermitra	149
5.	Pendapatan usahatani responden sesudah bermitra	150
6.	Regresi pendapatan petani responden pola kemitraan masyarakat	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi sektor riil yang menjadi harapan bagi masyarakat petani dalam meningkatkan pendapatannya. Hal ini searah dengan arah kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, bahwa: “Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dalam memperhatikan peningkatan produksi yang diatur Undang-Undang” (Anonim, 1999).

Pembangunan sub sektor pertanian sebagai bagian dari sektor pertanian di era globalisasi pada kondisi strategis dinamis dalam era perdagangan global yang kompetitif difokuskan pada komoditi unggulan yang dapat bersaing di pasar domestik dan di pasar internasional. Komoditi unggulan tersebut melandasi perlunya reorientasi sub sektor pertanian dari corak semi modern ke sub sektor pertanian yang lebih modern dengan strategi dasar dan pendekatannya adalah penerapan sistem agribisnis pertanian yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu komoditas pertanian yang potensial untuk dikembangkan guna memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf

hidup petani adalah komoditi jagung. Di Indonesia, jagung merupakan komoditi tanaman pangan kedua terpenting sesudah padi. Bahkan di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Jagung mempunyai kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai sebagai makanan pokok sebagai pengganti beras. Kebutuhan konsumsi jagung di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi per kapita per tahun dan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Permintaan produksi jagung nasional belum dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Permintaan pasar selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan produksi jagung rata-rata 2,2% tiap tahun, sedangkan permintaan akan jagung rata-rata naik 5% setiap tahun. Impor jagung Indonesia terus meningkat dengan angka perkiraan bakal mencapai 1,4 juta ton dengan jumlah devisa yang terkuras sekitar US \$ 182 juta. Padahal komoditas jagung yang bernama latin *Zea Mays* ini memiliki karakter yang bisa tumbuh subur di bumi Indonesia (Warisno, 1998)

Produksi jagung nasional hingga sekarang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga impor jagung masih dalam jumlah yang besar, yakni tahun 1996 sebesar 616.880 ton, tahun 1997 sebesar 1.068.021 ton, tahun 1998 sebesar 298.234 ton, tahun 1999 sebesar 591.058 ton dan tahun 2000 mencapai 1.264.575 ton (Subandi dkk, 2001).

Bahkan kebutuhan jagung untuk bahan baku makanan ternak juga meningkat dengan cepat dan ternyata tidak dapat diimbangi oleh peningkatan produksi jagung dalam negeri sehingga untuk mencukupi kekurangan dilakukan impor jagung yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Impor jagung yang cukup besar itu, tidak mengurangi devisa negara karena harga jagung di pasar internasional terus meningkat. Hal ini tidak saja mempengaruhi pendapatan negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan dan stabilitas perekonomian nasional (Abbas, 1996).

Propinsi Sulawesi Selatan adalah propinsi penghasil jagung terbesar keempat di Indonesia sesudah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung. Sulawesi Selatan memiliki lahan pertanian seluas 450.000 Ha yang cukup potensial untuk pengembangan jagung. Areal tersebut sebagian besar tersebar di lima daerah sentra pengembangan tanaman jagung yaitu di kabupaten Bone, Bantaeng, Gowa, Bulukumba dan Jeneponto. Adapun perkembangan luas panen dan produksi jagung Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Perkembangan luas panen dan produksi jagung di Sulawesi Selatan tahun 2000 – 2004 (BPS Sulawesi Selatan, 2005)

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Perkembangan (%)
2000	241.696	633.020	2,62	-
2001	191.960	515.405	2,69	- 18,58
2002	205.909	661.005	3,21	1,28
2003	213.818	650.832	3,04	- 1,54
2004	192.462	661.266	3,44	1,60

Tabel 2. Perkembangan luas panen dan produksi jagung pada lima daerah sentra produksi utama Sulawesi Selatan tahun 2000 – 2004 (BPS Sulawesi Selatan, 2005)

Tahun Panen	Hasil Produksi	Daerah Sentra				
		Bone	Bantaeng	Gowa	Bulukumba	Jeneponto
2000	Panen (Ha)	40.634	34.693	32.974	35.167	36.570
	Produksi (Ton)	84.132	114.331	104.894	90.056	96.464
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,071	3,296	3,181	2,561	2,638
	Perkembangan (%)	-	-	-	-	-
2001	Panen (Ha)	39.699	31.519	25.202	27.116	25.977
	Produksi (Ton)	76.747	101.397	104.301	61.056	64.920
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,933	3,217	4,139	2,252	2,499
	Perkembangan (%)	- 8,78	- 11,31	- 0,57	- 32,20	- 32,70
2002	Panen (Ha)	35.822	36.924	24.178	27.292	39.129
	Produksi (Ton)	68.983	168.819	107.083	80.918	122.689
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,926	4,572	4,429	2,965	3,136
	Perkembangan (%)	- 10,12	66,49	2,67	32,53	88,98
2003	Panen (Ha)	54.458	33.102	16.319	27.727	39.498
	Produksi (Ton)	109.913	132.693	71.902	83.934	125.776
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,018	4,009	4,406	3,027	3,184
	Perkembangan (%)	59,33	- 21,40	- 32,85	3,73	2,52
2004	Panen (Ha)	29.602	27.245	19.017	30.511	40.831
	Produksi (Ton)	67.531	127.211	116.938	98.483	129.179
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,281	4,669	6,149	3,228	3,164
	Perkembangan (%)	- 38,56	- 4,13	62,64	17,33	2,71
Jumlah	Panen (Ha)	200.215	163.483	117.690	147.813	182.005
	Produksi (Ton)	407.306	644.451	505.118	414.447	539.028
	Produktivitas (Ton/Ha)	10,229	19,763	22,304	14,033	14,621
	Perkembangan (%)	1,87	29,65	31,89	21,39	61,51

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten penghasil utama jagung dari kelima kabupaten sebagai daerah sentra pengembangan tanaman jagung yang mempunyai kontribusi yang cukup

besar terhadap peningkatan produksi jagung di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat pada tahun 2000 produksi jagung di Kabupaten Jeneponto sebesar 21% dari total produksi di Sulawesi Selatan sebesar 609.995 Ton pipil jagung kering (BPS Sul-Sel, 2004).

Komoditas jagung sudah lama diusahakan oleh petani di Kabupaten Jeneponto dan merupakan tanaman pokok kedua sesudah padi, umumnya ditanam pada lahan kering dan sedikit di lahan sawah. Penduduk Kabupaten Jeneponto, utamanya penduduk yang bermukim di daerah daratan medium sampai daratan tinggi sudah biasa menggunakan jagung sebagai makanan pokok substitusi (Anonim, 1993).

Komoditas jagung yang dahulu diusahakan biasanya adalah jagung putih varietas lokal yang produksinya rendah. Namun dengan perkembangan modernisasi pertanian, jagung putih lokal diganti dengan jagung kuning varietas unggul potensi tinggi. Keadaan ini sangat potensial untuk pengembangan sistem pertanian yang berorientasi agribisnis. Pentingnya jagung sebagai bahan makanan dan bahan baku industri, terutama industri pakan ternak, peningkatan produksi jagung melalui penanaman jagung unggul jenis kuning tidak perlu dikhawatirkan masalah pemasarannya. Produksi jagung kuning umumnya bisa mencapai 6 ton/hektar bila dibandingkan dengan jagung lokal yang rata-rata hasilnya dibawah 2 ton/hektar dan jagung komposit 2,5 ton – 3,5 ton/hektar, maka jagung kuning lebih berpeluang untuk dikembangkan.

Usahatani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto sudah dilakukan oleh petani secara turun temurun. Dan hasil produksi jagung kuning tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga dipasarkan disekitar wilayah Kabupaten Jeneponto, dan dipasarkan diluar pulau Sulawesi bahkan telah menembus pasar internasional. Hal ini telah memacu produktivitas kerja para petani jagung kuning dalam meningkatkan hasil produksinya. Peningkatan produktivitas kerja petani jagung kuning dipacu untuk menunjang taraf hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Masyarakat petani di Kabupaten Jeneponto mengusahakan komoditas jagung kuning sebagai penghasilan utama mereka sesudah usahatani padi.

Usahatani jagung kuning merupakan sumber pendapatan petani dikala panen padi telah selesai. Petani melakukan usahatani jagung kuning sebab petani menganggap tanaman jagung kuning tidak terlalu memerlukan biaya yang tinggi dan waktunya tidak lama, dimulai waktu tanam hingga pasca panen. Petani juga menganggap bahwa tanaman jagung kuning tidak terlalu memerlukan penanganan yang intensif yang menyita banyak waktu. Komoditas jagung kuning dapat berkembang dengan baik di daerah yang kondisi iklimnya seperti di daerah Jeneponto dengan jenis tanah latosol dan andosol dan pH tanah rata-rata 5,5.

Dari hasil pengamatan pendahuluan dilapangan diperoleh Gambaran bahwa hanya sebagian kecil petani jagung kuning yang melakukan pemupukan dan penanganan yang intensif, baik saat musim

tanam hingga pasca panen. Petani yang melakukan pemupukan dan penanganan yang intensif terhadap tanaman jagung kuning cenderung memproduksi jagung kuning lebih banyak dan kualitas yang baik serta jauh dari gangguan hama dan penyakit. Tetapi petani yang tidak melakukan pemupukan dan penanganan yang intensif terhadap tanaman jagung kuning, cenderung produksinya rendah dan kualitasnya juga rendah.

Dalam pengamatan perkembangan usahatani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto dari tahun ke tahun nampaknya mengalami peningkatan walaupun bervariasi perkembangannya baik dari segi areal panen, dari segi peningkatan produksi secara total, maupun dari segi peningkatan produktivitasnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan usahatani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto (Dinas Pertanian Jeneponto, 2005)

Musim Tanam (Tahun)	Luas Lahan (Hektar)	Produksi Total (Ton)	Produktivitas (Ton/Hektar)	Pertumbuhan (%)
2000	21.867	99.757	4,562	-
2001	22.569	100.928	4,472	1,17
2002	22.468	101.510	4,518	0,58
2003	20.498	91.749	4,476	- 9,61
2004	23.207	106.473	4,588	16,05
Jumlah	110.609	500.417	22,616	8,19
Rata-Rata	22.121,8	100.083,4	4,523	1,638

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto rata-rata yang dicapai baru 4,4 – 4,6 Ton/Ha sementara potensi tingkat produktivitas dapat dicapai sekitar 8 – 10 Ton/Ha. Dengan demikian peluang peningkatan produksi masih cukup besar dan petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto memiliki optimisme yang tinggi untuk mencapai tingkat produktivitas yang maksimal. Optimisme petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto terlihat dengan menjadikan usahatani jagung kuning sebagai usahatani pokoknya dengan adanya jaminan pemasaran yang cukup baik dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Harga jagung kuning pipilan kering saat ini telah mencapai Rp.1.150,- sampai Rp. 1.650,- per kilogram dengan kadar air 18%.

Pengelolaan tanaman jagung kuning secara teknis umumnya telah dipelajari dan diterapkan oleh petani dengan bantuan pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui para penyuluh lapangan pertanian. Pengelolaan tanaman jagung mulai pada proses penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, hasil panen sampai pemasarannya, antara petani dan penyuluh lapangan pertanian telah dilaksanakan secara berkesinambungan.

Seiring dengan usaha-usaha peningkatan hasil produksi jagung kuning ditemui pula berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan usahatani jagung kuningnya. Keterbatasan sarana produksi seperti benih

unggul, pupuk dan insektisida secara tepat waktu serta terbatasnya modal petani untuk mengembangkan usahatani jagung kuning. Pada kenyataan peningkatan produksi jagung kuning di Kabupaten Jeneponto dari tahun ke tahun ternyata belum dapat menjamin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta keluarganya. Penyebabnya antara lain, produksi jagung kuning pipilan kering yang dihasilkan oleh petani belum memenuhi standar kualitas seperti yang dipersyaratkan oleh pasar. Dan permasalahan petani yang paling mendasar dalam usahatani jagung kuning adalah petani selalu berada dalam posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu dalam masyarakat petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto telah berusaha membentuk lembaga-lembaga kemitraan usahatani untuk mengatasi kendala-kendala yang mereka temui. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi fenomena seperti ini adalah dengan mengembangkan pola kemitraan yang ideal antara petani dengan pengusaha dengan wujud hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Sasaran yang paling utama dan menyentuh langsung untuk mendapatkan perhatian pada usahatani jagung adalah aspek peningkatan pendapatan bagi petani jagung kuning dengan usahatani komersil melalui pola kemitraan dengan orientasi pembangunan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya masalah ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji melalui suatu penelitian tentang

pengaruh pola kemitraan terhadap peningkatan pendapatan petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto dalam judul tesis “**Analisis Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Melalui Pola Kemitraan Masyarakat Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto**”.

B. Rumusan Masalah

Komoditi jagung telah lama diusahakan oleh petani di Kabupaten Jeneponto dengan tingkat produktivitas yang masih rendah, teknik budidaya yang rendah dan masih kurangnya peran penyuluh pertanian dalam mendorong petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto untuk menerapkan pola kemitraan masyarakat dalam usahatani. Dalam mengembangkan usahatani jagung kuning dalam peningkatan pendapatan petani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, penulis melakukan penelitian ditinjau dari aspek sumberdaya alam, sumberdaya manusia, aspek pembiayaan, kelembagaan dan aspek kemitraan.

Dari masalah pokok tersebut, dapat dikemukakan beberapa pertanyaan yang didasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usahatani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto?
2. Berapa besarkah perbedaan tingkat pendapatan petani jagung kuning sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji usahatani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat serta mekanisme pelaksanaan kemitraan yang sudah ada antara petani jagung kuning dengan pengusaha/pedagang jagung kuning di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan petani jagung kuning sebelum dan sesudah bermitra di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi petani jagung kuning yaitu:

1. Sebagai informasi mengenai tingkat pendapatan petani jagung kuning pada pola kemitraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto .
2. Sebagai landasan analisis dalam merumuskan konsep dan strategi kemitraan usaha yang lebih kondusif antara petani jagung kuning c pengusaha/pedagang di Kabupaten Jeneponto.
3. Sebagai bahan informasi bagi aplikasi praktisi yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan usahatani jagung kuning dengan pola kemitraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemitraan Usahatani

Kemitraan usaha bertujuan meningkatkan nilai tambah atau keuntungan bagi kelompok mitra dan perusahaan mitra yang melakukan kemitraan. Dari segi pendapatan, kesinambungan usaha, peningkatan sumberdaya manusia oleh kelompok mitra, dan peningkatan volume usaha, dapat menumbuhkan dan meningkatkan usaha kelompok mitra yang mandiri. Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya mempercayai antara perusahaan mitra dengan kelompok tertentu melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan yang:

1. Saling membutuhkan, dalam arti pengusaha/pedagang memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
2. Saling menguntungkan, yaitu baik petani maupun pengusaha / pedagang memperoleh peningkatan pendapatan / keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha.
3. Saling memperkuat, dalam arti baik petani maupun pengusaha / pedagang sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama

mempunyai persamaan hak dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.

Sesuai kebijakan umum kemitraan usaha disektor pertanian, Badan Agribisnis Departemen Pertanian (1998) bahwa pada dasarnya kemitraan dalam usaha agribisnis merupakan instrumen perekat untuk *menstimulir* keselarasan dan keserasian kerjasama yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan diantara pelaku agribisnis yaitu: petani, kelompok tani, pengusaha swasta, koperasi, asosiasi/organisasi profesi dan masyarakat ilmiah. Dengan terwujudnya kemitraan usaha diantara pelaku agribisnis tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah secara profesional diantara pelaku kemitraan.

Kemitraan berdasarkan keputusan bersama Asisten Menteri Negara Bidang Peningkatan Kemampuan Bidang Usaha Nasional dan Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah dalam modul kemitraan Pemerintah – Pengusaha – Masyarakat, Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (2001) bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan dalam arti sempit adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak (badan-badan individual dengan lembaga pemerintah) guna melakukan suatu kegiatan/usaha secara bersama-sama

dengan saling melengkapi agar tercapai tujuan yang diinginkan bersama. Kemitraan dalam arti luas adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling memperbesar.

Jadi “kemitraan” merupakan suatu akumulasi bisnis yang menggabungkan sinergi kekuatan dari beberapa elemen atau instrumen dari modal, teknologi, manajemen sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam, yang dimiliki oleh individu, kelompok atau negara. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis (Hafsah, 2000).

Maka dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut haruslah memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan yang merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Tersirat dalam uraian ini bahwa peletakan dan pemahaman etika bisnis bagi pelaku kemitraan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami sebagai pondasi untuk meletakkan pilar-

pilar kemitraan yang melekat dan sangat berperan strategis dalam mengacu keberhasilan kemitraan.

Ada beberapa model kerjasama kemitraan antara petani dengan perusahaan. Berdasarkan jangka waktunya, kerjasama kemitraan dapat dibagi menjadi tiga model, yakni: (Masir, 1994)

1. Kemitraan Insidental, yakni bentuk yang didasarkan oleh kepentingan ekonomi bersama dalam jangka pendek dan dapat dihentikan sesudah kegiatan bersangkutan selesai. Kemitraan ini dijalin, biasanya dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil usahatani dan dilakukan dengan atau tanpa kesepakatan.
2. Kemitraan Jangka Menengah, kemitraan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis dan berlangsung pada satu atau beberapa musim tertentu.
3. Kemitraan Jangka Panjang, kemitraan ini dilakukan dalam skala besar dan dengan perjanjian tertulis. Hal ini didasarkan oleh saling ketergantungan dalam hal pengadaan bahan baku, permodalan, dan manajemen.

Keberadaan kemitraan akan selalu memberikan nilai tambah bagi pihak yang bermitra dari berbagai aspek seperti manajemen, pemasaran, teknologi, permodalan, dan keuntungan.

Besarnya nilai tambah tergantung kemampuan dalam menyiasati strategi yang disusun secara bersama dan target sasaran yang ingin dicapai, maka dengan demikian “kemitraan” itu sendiri merupakan proses.

Proses ini diawali dengan perencanaan, kemudian rencana-rencana tersebut diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi secara terus menerus oleh pihak-pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadilah alur harapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Keberhasilan itu sendiri diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non material. Nilai tambah akan berkembang terus menerus dengan peningkatan pengadaptasian perubahan yang terjadi. Jadi, nilai tambah yang didapat merupakan fungsi kebutuhan yang ingin dicapai.

Berdasarkan keterangan di atas, maka semakin kuat pemahaman serta penerapan etika bisnis bagi pelaku kemitraan akan semakin kokohnya pondasi kemitraan yang dibangun dan pada gilirannya akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri. Disamping itu dengan pondasi yang kuat tadi akan dengan mudah mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan.

Nilai-nilai dasar etika bisnis terkadang menjadi kabur dan terabaikan oleh kegairahan untuk mendapatkan keuntungan dan fasilitas dengan mudah dan cepat. Pemahaman dan istilah-istilah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya disalahartikan dan cenderung mengambil jalan pintas dengan

menghalalkan segala cara mencari kemudahan dari penguasa, menyalahgunakan fasilitas, dan yang mengakibatkan kolusi. Memang pada prakteknya, dalam waktu sekejap dapat memberikan keuntungan yang besar namun keberhasilan tersebut semu dan rapuh, gampang goyah, serta kurangnya kemandirian menyebabkan daya saing melemah.

Etika bisnis yang rapuh menambah dan menggerogoti ikatan kemitraan yang berlangsung sekarang ini, memberi kesan kurang dipahaminya hal-hal yang menjadi komitmen dasar dari keberadaan kemitraan tersebut.

Pada masa mendatang pemahaman dan implementasi etika bisnis yang benar dan konsisten secara terus menerus disosialisasikan dan dijadikan landasan moral dalam pelaksanaan kemitraan oleh pelaku-pelaku kemitraan. Hal terpenting dari proses sosialisasi ini adalah diperlukannya bukti yang konkrit, bukan hanya pernyataan belaka saja. Kita telah terbiasa mendengarkan pernyataan-pernyataan, retorika ataupun slogan-slogan kemitraan, tapi hanya sedikit yang memberikan contoh untuk dijadikan suatu panutan. Hal ini merupakan permasalahan mendasar yang tidak memberikan dampak positif terhadap keberadaan kemitraan itu sendiri.

John Mariotti (1993) dalam bukunya *The Power of Partnership* mengemukakan bahwa ada enam dasar etika bisnis. Dimana empat hal yang pertama merupakan hubungan interaksi manusia dan selebihnya

merupakan perspektif bisnis, maka keenam dasar etika bisnis tersebut adalah: (Hafsah, 2000)

1. Karakter, Integritas dan Kejujuran

Karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan lainnya. Karakter yang dimiliki oleh petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto secara umum tentunya memiliki ciri khas yang berbeda dengan karakter petani jagung kuning di daerah lain. Dalam pola kemitraan, semua pihak harus mempelajari, memahami dan menghormati karakter masing-masing, agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan lancar. Tanpa adanya saling pengertian antara karakter masing-masing mitra, maka pola kemitraan yang diharapkan tidak mungkin terjadi.

Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar yang merupakan kesatuan antara kata dengan tindakan. Jika integritas masing-masing pihak dalam menjalin kemitraan tinggi maka kerjasama/kemitraan dapat berjalan lancar.

Kejujuran adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia. Kejujuran ini tidak hanya cukup diawali niat tapi lebih penting lagi dalam praktek sehari-hari. Kemitraan yang diawali dengan kejujuran dari pelaku yang bermitra dapat merupakan awal terbentuk transparansi dalam segala manifestasinya.

Semakin kuat karakter, integritas dan kepercayaan yang dimiliki oleh pihak yang bermitra maka semakin kuat pula hubungan kemitraan

yang terjalin, berarti semakin besar nilai tambah yang diharapkan sehingga semakin besar pula peningkatan pendapatan yang diinginkan.

2. Kepercayaan

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalin bisnis. Kepercayaan merupakan suatu proses yang ditempuh melalui ujian dan saringan dalam ukuran suatu proses satuan waktu. Kemitraan yang dibangun berdasarkan kepercayaan itu sendiri, susah untuk hilang. Konsistensi dalam menindaklanjuti segala kesepakatan yang telah disusun bersama.

Semakin besar kepercayaan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang bermitra maka semakin besar arti kemitraan yang terjalin. Ini berarti semakin besar nilai tambah yang didapatkan sehingga semakin besar pula pendapatan yang diinginkan.

3. Komunikasi yang Terbuka

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan. Kemitraan senantiasa berkembang sesuai dengan tantangan dan masalahnya. Kemitraan itu dinamik, agar supaya dapat eksis bertahan maka kemitraan itu selalu memerlukan ide, gagasan dan informasi yang terus berkembang. Bila ide, gagasan dan informasi dipasang maka akan menghasilkan suatu bentuk pemikiran yang kaku dan terhambat serta melahirkan suatu kreatifitas yang dipaksakan yang berasal dari satu pihak.

Maka pertukaran informasi secara bebas oleh pelaku yang bermitra akan melahirkan suatu ide gagasan cemerlang yang akan memiliki kreatifitas sehingga berdampak pada kegiatan atau usaha yang akan dilakukan.

Semakin terbuka komunikasi yang terjalin maka hubungan kemitraan yang terjalin semakin lancar, yang berarti semakin kuat kemitraan yang terjalin dan meningkatkan nilai tambah yang diharapkan untuk peningkatan pendapatan yang diinginkan.

4. Adil

Secara harfiah adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Pengertian dasar yang terkandung dari sikap adil adalah mempunyai atau menunjukkan suatu tindakan yang bebas dari bias atau berarti bersikap sama atau seimbang terhadap semua orang. Sikap adil ini sangat individu dan tidak mudah untuk bersikap adil pada semua pihak tanpa ada pengertian yang kadang berwujud pada pengorbanan. Kemitraan yang dilandasi sikap adil menunjukkan adanya pengorbanan dari pihak yang bermitra untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengorbanan yang diberikan oleh suatu pihak bukan merupakan suatu kerugian melainkan suatu tindakan yang telah diperhitungkan demi meraih suatu nilai tambah yang maksimal.

5. Keinginan Pribadi dari Pihak Yang Bermitra

Sebelum dua pihak memulai untuk bekerjasama dalam kemitraan pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini sudah tentu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, tetapi juga non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan-kepuasan tertentu.

Keinginan merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari kemitraan. Batasan dari pencapaian keinginan tersebut harus disadari sampai sejauh mana memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimiliki sehingga dengan bermitra terjadi sinergi antar pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

6. Keseimbangan Antara Intensif dan Resiko

Kemitraan merupakan perpaduan antara resiko yang diberikan dengan hasil atau insentif yang diterima. Keseimbangan akan terus mewarnai perjalanan kemitraan, dengan kata lain pihak-pihak yang bermitra harus ada keinginan untuk memikul beban bersama selain menikmati keuntungan secara bersama. Keseimbangan ini harus terus ditumbuh kembangkan sebagai penjabaran dari aturan praktek-praktek bisnis secara umum. Keinginan untuk mengambil resiko dari suatu usaha dapat diartikan sebagai awal dari keberhasilan kemitraan. Jika kemitraan yang dijalin berhasil, berarti nilai tambah yang diterima semakin besar, yang berarti pendapatan yang akan diterima akan semakin besar pula.

Menurut Khaerul (1994), kemitraan mempunyai tujuan antara lain:

1. Saling mendukung, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara usaha kecil dan usaha besar melalui ikatan kerjasama ke depan dan ke belakang.
2. Menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha bagi kedua belah pihak yang akan memperkuat ekonomi dan industri nasional sehingga menjadi tulang punggung pembangunan dan tatanan dunia usaha.
3. Menciptakan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, manajemen dan teknologi sehingga menjadi bekal masyarakat untuk bisa turut berperan sebagai pemain dominan pasar global.
4. Mengatasi kesenjangan sosial.

B. Pola Kemitraan: Aspek Legal, Ekonomi dan Manajemen

Berdasarkan pengalaman mikro yang telah diuraikan, kemitraan yang dilakukan cukup beragam. Hal yang dikembangkan ternyata memang tidak lepas dari segi legal. Secara formal, kemitraan dikonsepsikan dalam Undang-Undang (UU) No. 9 tahun 1995, yaitu: "Kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan".

Dalam kenyataannya, kemitraan usaha yang dikembangkan dalam berbagai tingkatan dan bentuk yang semuanya perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan manajemen. Sebagaimana telah diuraikan dalam berbagai pengalaman, seperti yang telah dituliskan oleh Sumardjo dan Hafsa (2001). Pola kemitraan yang dikenal antara lain:

1. Kemitraan Inti Plasma

Merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra (biasanya petani atau kelompok tani) sebagai plasma dengan perusahaan induk yang bermitra usaha. Pola ini memang umum dilakukan pada usaha pertanian dan perkebunan atau perusahaan yang terkait erat dengan petani (misalnya perusahaan rokok – meski tidak secara lugas menyebutkan sebagai pola inti plasma).

Selintas pola ini merupakan modifikasi pola perkebunan jaman kolonial, dimana posisi plasma cenderung hanya menjadi buruh pada perusahaan inti yang menjadi mitranya. Dalam kasus mikro seperti yang diuraikan Thalib (2003), dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam bertanam kapas Bollgard. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi. Perusahaan inti tetap memproduksi kebutuhan usahanya, plasma wajib memenuhi kebutuhan usaha inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Namun demikian, tidak dinafikan adanya beberapa keunggulan pola inti plasma, seperti:

- a. Memberikan keuntungan timbal balik antara inti dengan plasma melalui pembinaan dan penyediaan sarana produksi, pengolahan serta pemasaran hasil, sehingga tumbuh ketergantungan yang saling menguntungkan.
- b. Meningkatkan keberdayaan plasma dalam hal kelembagaan dan modal sehingga pasokan bahan baku kepada inti lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas.
- c. Usaha skala kecil yang dibimbing inti mampu memenuhi skala ekonomi sehingga usaha kecil ini mampu mencapai efisiensi.
- d. Perusahaan inti dapat mengembangkan komoditas barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasaran.
- e. Keberhasilan pola inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi investor lainnya sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang pada gilirannya membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa catatan yang perlu dicermati yakni dalam pelaksanaan pola inti plasma:

- a. Persiapan dan tahapan awal merupakan proses yang menyita waktu, perhatian, memerlukan kesabaran dan upaya yang terus-menerus, sebelum menjadi pola yang berhasil dan saling menguntungkan.
- b. Pola ini akan berhasil baik bila jenis usaha inti sama atau terkait dengan apa yang dihasilkan plasma.

c. Kemitraan akan berhasil bila dilaksanakan pada skala ekonomi yang layak.

d. Kemitraan harus didasarkan pada perjanjian kerja yang merinci secara jelas atas hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang bermitra. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan (mikro) juga tidak mudah dan menghadapi beberapa kendala, yakni:

- a. Kelompok atau koperasi yang menaungi masyarakat bila belum mandiri tidak dapat mewakili aspirasi anggotanya.
- b. Pemahaman atas hak dan kewajiban umumnya belum baik.
- c. Perusahaan inti belum sepenuhnya memenuhi fungsi dan kewajiban sebagaimana diharapkan.
- d. Belum ada kontrak yang benar-benar bisa menjamin terpenuhinya persyaratan komoditas yang diharapkan.
- e. Belum adanya lembaga arbitrase yang mampu menjadi penengah kala terjadi perselisihan.

Perusahaan inti yang memenuhi salah satu syarat berikut agar dapat menjadi perusahaan penghela atau perusahaan pengelola:

- a. Melaksanakan pembukaan lahan (atau menyediakan kapal untuk perikanan tangkap), memiliki usaha budidaya atau penangkapan, dan memiliki sarana pengolahan yang dikelola sendiri oleh perusahaan. Selain itu, melaksanakan pembinaan atau pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit,

serta pengolahan hasil, menampung produksi dan memasarkan hasil.

- b. Tidak melakukan budidaya (atau penangkapan ikan) sendiri, tapi hanya mempunyai usaha pengolahan.
- c. Tidak melakukan usaha budidaya (usaha penangkapan) sendiri dan tidak memiliki unit pengolahan.

Dalam pelaksanaannya, perlu dicermati hubungan kelembagaan antara mitra, mengingat kedudukan inti cenderung lebih kuat dan dominan dibanding plasma, khususnya dalam pemasaran hasil meskipun disisi lain hal ini akan memacu plasma untuk berusaha secara lebih profesional dalam menangani jenis usahanya guna menghadapi mitranya yang lebih kuat.

2. Kemitraan Subkontrak

Bentuk kemitraan ini pada dasarnya merupakan hubungan dimana usaha kecil memproduksi bahan (baik bahan baku, setengah jadi, atau bahan jadi) yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari kegiatan produksinya. Dalam kasus mikro yang diuraikan Sirajuddin (2004), dibuktikan masyarakat kabupaten Maros dengan membuka peternakan ayam ras pedaging bersama sebuah perusahaan swasta. Umumnya bentuk ini dicirikan oleh adanya kesepakatan dalam hal jumlah, jenis, mutu, dan waktu penyelesaiannya. Pola sub-kontrak diketahui memiliki beberapa unggulan yakni dapat mendorong alih teknologi, modal, dan keterampilan serta adanya jaminan pemasaran produksi.

Kelemahannya adalah adanya kecenderungan mengisolasi produsen kecil selaku sub-kontaktor kedalam salah satu bentuk monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran. Akibatnya, tidak jarang sub-kontraktor ditekan dengan harga input tinggi dan harga produk yang rendah, pengawasan mutu produk kelewat ketat, dan keterlambatan pembayaran disertai gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.

Maka pemerintah dituntut mampu menerapkan kebijakan yang tegas dan tindakan konsisten untuk melindungi usaha kecil dari kemungkinan buruk, dengan cara membantu menumbuhkan pola kemitraan yang dibangun atas asas saling memerlukan dan saling percaya sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif bagi kedua belah pihak.

3. Kemitraan Perdagangan Umum

Merupakan pola usaha dimana unit usaha kecil memasok kebutuhan perusahaan pemasar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan agribisnis, khususnya produk hortikultura, diketahui menggunakan pola ini, misalnya petani atau kelompok tani yang tergabung dalam koperasi memasok kebutuhan pasar swalayan. Pola ini membutuhkan dukungan pendanaan yang besar baik dari kelompok perusahaan besar maupun perusahaan kecil.

Sifat kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Keuntungannya, ada jaminan harga dan produk dengan

kuantitas dan kualitas sebagaimana yang telah disepakati. Pantas dicatat bahwa perusahaan besar berada pada posisi diuntungkan karena mereka mampu menentukan harga dan volume secara sepihak sehingga pada akhirnya cenderung merugikan kelompok mitranya. Dalam prakteknya, pembayaran menggunakan sistem konsinyasi sehingga membuat pembayaran pada usaha kecil sering tertunda dan merugikan perputaran uang pengusaha kecil yang memang sudah terbatas permodalannya.

4. Pola Kemitraan Keagenan

Pada pola keagenan, usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan menengah dan besar yang menjadi mitranya. Usaha besar bertanggung jawab dalam hal memasarkan produk perusahaan besar dan menengah yang menjadi mitranya, terkadang disertai target-target yang harus dipenuhi.

Keuntungan pola ini ada pada bentuk komisi penjualan. Agen adalah tulang punggung pemasaran usaha besar dan menengah. Untuk itu agen harus profesional, handal, dan ulet memasarkan produk, sehingga kepiawaian dalam mencari dan memuaskan pembeli, nasabah, atau pelanggan, menjadi prasyarat utama. Mengingat agen berhubungan langsung dengan pembeli, maka keberhasilan agen secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan mitra usahanya.

5. Kemitraan Waralaba (*Franchise*)

Pola ini pada dasarnya merupakan pemberian lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaan kepada kelompok usaha kecil

sebagai mitra usaha perusahaan besar dan menengah disertai dengan pemberian bantuan bimbingan manajemen. Perusahaan milik waralaba bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran, merek dagang, dan sebagainya kepada mitranya. Pemegang usaha waralaba hanya mengikuti pola yang ditetapkan pemilik dengan memberikan sebagian pendapatan sebagai pembayaran royalti dan biaya lain yang terkait dengan usaha tersebut..

Pola ini memiliki kelebihan bahwa kedua belah pihak yang terlibat sama-sama memperoleh keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya, diantaranya adalah tersedianya alternatif sumber pendanaan, penghematan modal dan efisiensi, juga membuka kesempatan kerja. Namun, tetap dengan kelemahan yang pantas dicatat berupa ketergantungan yang sangat besar bagi usaha kecil terhadap pemilik waralaba, berupa ketergantungan dari segi teknis dan aturan yang serba mengikat. Perusahaan pengelola juga tidak dengan mudah mengontrol atau mengendalikan perusahaan terutama dalam jumlah penjualan.

Sesudah mencermati berbagai bentuk pola kemitraan yang telah berkembang dimasyarakat sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik suatu pola kemitraan secara umum yang dapat dikembangkan di Indonesia mulai dari yang paling sederhana sampai pola ideal yang mewujudkan ketergantungan yang besar antara pihak-pihak yang bermitra.

Adapun pola kemitraan yang dimaksud adalah:

1. Pola Kemitraan Sederhana (Pemula)

Dalam kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan hubungan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung-jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Dalam kemitraan tersebut secara garis besar perusahaan/ pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan teknologi terutama teknologi (alat mesin) untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi. Sedangkan bagi pengusaha usaha kecil yang menjadi mitra mempunyai kewajiban untuk memasokkan hasil produksinya kepada pengusaha besar mitranya dengan jumlah dan standar mutu sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama.

2. Pola Kemitraan Tahap Madya

Pola kemitraan ini merupakan pengembangan pola kemitraan sederhana dimana peran usaha besar terhadap usaha kecil mitranya semakin berkurang. Bantuan pembinaan usaha besar yang masih sangat diperlukan terutama dalam bantuan teknologi, alat mesin yang dibutuhkan dalam peningkatan produksi dan mutu produksi, industri pengolahan (agroindustri) serta jaminan pemasaran. Dalam aspek penyediaan

permodalan pada pola ini pihak usaha besar tidak lagi memberikan modal usaha, tetapi permodalan, manajemen usaha dan penyediaan sarana produksi disediakan oleh usaha kecil.

Dalam tingkatan madya ini pihak usaha kecil telah mampu mengembangkan usaha mulai dari merencanakan usaha serta pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan kemitraan yang dijalin dengan usaha besar.

3. Pola Kemitraan Tahap Utama

Pola ini merupakan pola kemitraan yang paling ideal untuk dikembangkan, tetapi membutuhkan persyaratan yang cukup berat bagi pihak yang bermitra khususnya pihak usaha kecil karena pola ini membutuhkan kemampuan penguasaan manajerial usaha yang memadai serta pengetahuan bisnis yang luas.

Dalam pola ini pengusaha kecil secara bersama-sama mempunyai patungan atau menanamkan modal usaha pada usaha besar mitranya dalam bentuk saham. Dengan pemilikan saham dari pengusaha kecil ini dimungkinkan adanya rasa memiliki terhadap perkembangan usaha dari perusahaan besar mitranya. Demikian pula pihak perusahaan besar mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk turut mengembangkan usaha kecil mitranya agar usaha besar yang dijalankan dapat berkembang lebih besar. Disamping itu adanya beban resiko bersama dalam pola ini menjadikan kemitraan dapat terwujud dengan sinergi saling

membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat sebagaimana yang diharapkan.

Keterlibatan pengusaha kecil dalam pengembangan usaha pada perusahaan besar pada pola ini mulai dari tahap perencanaan pengembangan usaha sampai pengembangan pemasaran hasil. Pada pola ini telah memanfaatkan jasa konsultan dalam mengembangkan usahanya baik pada usaha kecil maupun usaha besar mitranya.

C. Pengembangan Kemitraan Masyarakat Dalam Berusahatani

Makcham dan Malcolm (1991), mengemukakan bahwa usahatani adalah menyangkut tatacara pengelolaan pertanian. Hal ini lebih ditekankan pada aspek pengelolaan (manajemen) maka dalam usahatani tersebut tercakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan, dan pengendalian. Sehubungan dengan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa usahatani adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan dan pengendalian kegiatan perusahaan lahan pertanian dalam usaha menghasilkan produk pertanian tertentu secara menguntungkan. Dengan memperhatikan rumusan tersebut, maka usahatani yang dimaksud mempunyai watak usaha yang berorientasi pada perolehan laba atau bersifat komersial.

Kemitraan dalam konteks pengembangan usahatani hakekatnya merupakan proses yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang

berkeadilan. Bagian penting dari prosesnya itu bukan hanya hasil material tetapi termasuk hasil kualitatif strategis, seperti; keterlibatan pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pembagian perolehan hasil. Pola-pola kemitraan dalam konteks yang demikian tidak hanya diukur oleh kecukupan aspek-aspek finansial-ekonomis semata, mesti mencakup juga hal-hal bukan-material, seperti pengakuan atas proses yang menyertainya, pengakuan dan perlindungan hak, kesempatan menjalankan kewajiban, merasakan kebersamaan, persaudaraan, kebebasan, atau rasa saling menghormati.

Pembentukan hubungan atau tepatnya pengembangan saling hubung antara pengembangan kemitraan dan usahatani bukanlah hal baru. Persoalannya, kedua hal tersebut lebih sering menjadi rancangan yang tertuang dalam sebuah rumusan rencana cetak-biru, tetapi berujung dengan kesenjangan dalam implementasinya. Sementara itu, dalam konteks tersebut pembentukan saling hubungan itu tetap diminati sebagai satu harapan yang dapat mengembangkan produktivitas kerja dan meningkatkan posisi tawar yang adil antar pihak yang berkepentingan dalam usahatani. Bahkan, diharapkan apabila proses ini berhasil dapat memberdayakan masyarakat yang sinergis dengan pengembangan kawasan. Semoga harapan itu tidak menjadi sebuah mitos.

Dalam menelusuri keperluan menemukan strategi kebijakan mengenai saling hubung antara upaya pengembangan kawasan dengan kerjasama dan kemitraan yang mendorong pengembangan ekonomi di

daerah-daerah dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi pembangunan, sehingga tidaklah bijak menerapkan asas model pembentukan kebijakan linear yang didominasi oleh pihak tertentu dan prosesnya cenderung datang dari atas (pusat) secara seragam dan umum, dengan harapan rumusan kebijakan itu dapat diimplementasikan ke bawah (daerah) dengan berbagai modifikasi.

Kebijakan yang mewarnai pengembangan kemitraan masyarakat dalam berusahatani, diharapkan dapat memberi rangsangan pemikiran dalam melacak pola-pola kemitraan yang memberi peranan keberbagai pihak dalam mengembangkan usahatani secara seimbang, dan mempunyai implikasi pada pemberdayaan masyarakat yang sekaligus berfungsi untuk saling sokong dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Pembahasan pengembangan kemitraan dengan masyarakat diambil dari sebuah pengalaman mikro yang membangkitkan masyarakat dalam pengembangan usaha-usaha produktif misalnya pada usahatani jagung kuning yang menjadi obyek penulisan tesis ini. Hal ini diungkapkan dengan maksud agar asas dan prinsip kemitraan pengembangan usahatani dikembangkan berdasarkan pengalaman yang memang mengakar dalam masyarakat, seperti yang dipaparkan pada pemaparan berikut ini (Kolopaking, 2002)

1. Memulai Aksi di Tingkat Komunitas

Apabila melakukan proses perumusan strategi pembangunan terpusat, maka pada taraf tertentu akan ada pengabaian atas keunggulan komparatif dan kompetitif suatu daerah. Padahal hal seperti ini pada masa mendatang menjadi kurang tepat. Berdasarkan pemahaman ini ingin disampaikan mengenai proses pengembangan kemitraan yang berbasis pada potensi suatu daerah (lokal) dengan perancangannya berawal di aras komunitas.

Hal yang pertama dilakukan dalam hal ini adalah mengajak masyarakat bersama-sama melakukan pencerahan, dan tidak mulai dengan menawarkan melakukan kemitraan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengajak tokoh-tokoh masyarakat menilai akan produktivitas yang selama ini dikembangkan. Usul yang kemudian disepakati adalah melakukan kunjungan ke luar wilayah mereka untuk melihat berbagai kesuksesan dan kegagalan. Proses ini selanjutnya bergulir dengan *musyawarah* mencari terobosan dalam mengembangkan usaha produktif dalam skala keluarga dan kelompok (contoh disini usahatani jagung kuning yang awalnya melibatkan beberapa kepala keluarga). Kegiatan yang disebut masyarakat sebagai *aksi bersama*. Dalam mendorong aksi bersama ini, dimulai dengan mengajak masyarakat mengingat kembali kekuatan mereka dalam berorganisasi membentuk kegiatan sosial. Keberhasilan melakukan kegiatan sosial memperkuat kembali masyarakat untuk berhimpun melakukan usaha. Selanjutnya hal tersebut seperti menjadi media pembelajaran masyarakat, terutama dalam kaitan

mengubah kemahiran dari mengorganisasikan kegiatan sosial menjadi kegiatan yang bernilai ekonomi. Dalam waktu dua musim, masyarakat mulai membuat prosedur *pembagian hasil yang adil* dari usaha yang dikembangkannya. Proses kegiatan dikomunitas ini berlanjut menjadi sebuah “siklus program”, dan bahkan mulai menyebar ke beberapa komunitas lain dengan beragam jenis usaha produktif (kerajinan, simpan pinjam, berusahatani jagung hingga beternak ayam). Keberhasilan ini membuat masyarakat mempunyai kebanggaan sendiri, sehingga mereka mulai berani menjelaskan dan berbagi pengalaman dengan kata-kata sendiri mengenai langkah-langkah yang sepatutnya diambil untuk berhasil kepada berbagai pihak.

Keberhasilan masyarakat mempertahankan usaha produktifnya dalam satuan komunitas mulai dilirik oleh pemerintah desa. Usaha-usaha produktif ini kemudian diorganisasikan oleh pemerintah desa, dan melalui berbagai kesempatan mulai proses pembelajaran itu diungkap dalam lokakarya-lokakarya di aras kecamatan hingga kabupaten. Hal yang menarik, kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat dalam kasus ini mampu menjadi “jembatan” mengkaitkan berbagai usaha produktif di aras keluarga/kelompok dengan pihak lain di aras lebih tinggi. Ini menjadi cikal bakal dikembangkannya kemitraan.

2. Melanjutkan Usahatani dari Komunitas ke Organisasi Desa

Usaha produktif berbasis komunitas ini selanjutnya bersambungan dengan kepentingan sebuah perusahaan multinasional dalam melakukan

kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*). Dalam mengkaitkan usaha ini dicoba menghubungkan keperluan perusahaan dengan usaha masyarakat. Misal memanfaatkan usaha kerajinan masyarakat untuk mengisi keperluan cenderamata yang diperlukan perusahaan. Tetapi, masyarakat belajar tidak bergantung kepada perusahaan ini. Mereka kemudian secara bermartabat berbagi kepentingan, yang pada gilirannya sikap ini menjadi dasar melakukan kemitraan dengan berbagai pihak yang mempunyai kesamaan kepentingan. Pemerintah desa kemudian mencoba mengorganisasikan berbagai unit usaha masyarakat dalam satu wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Masyarakat kemudian belajar menerima kerjasama dengan berbagai pihak dengan koordinasi BUMDES ini. Meskipun proses ini masih belum baik benar tetapi telah mendorong masyarakat untuk bermitra dengan berbagai pihak (pemerintah-eksekutif dan legislatif, perusahaan, lembaga bukan-pemerintah, perguruan tinggi hingga perbankan) dalam posisi sebagai subyek.

3. Menjadi Unsur Pengelolaan Kolaborasi

Pembentukan usaha produktif berbasis komunitas ini kemudian menjadi sarana membentuk berbagai kegiatan kemitraan usaha, dengan prosesnya tidak lepas dari pengembangan kelembagaan pembangunan secara kolaboratif. Perkembangan proses ini ditentukan oleh kemampuan

masyarakat membentuk jejaring kolaborasinya. Tidak dinafikan proses ini berhasil karena ada pihak luar yang menjadi fasilitator, dan dapat mensinergikan kepentingan seluruh *stakeholders* dalam kerangka saling hubung antara usaha produktif dengan pengembangan masyarakat. Hal yang kemudian menjadi sebuah proses ekonomi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal dalam konteks ekonomi suatu wilayah atau daerah. Dalam proses ini masyarakat melalui jalur belajar membentuk kesamaan opini dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengembangan usahatani. Proses yang dilalui dengan cukup melelahkan karena masyarakat mengikuti sebuah proses adaptasi beragam pihak menentukan sebuah kelembagaan pengelolaan baru.

Kemitraan usaha dengan berbagai pihak ini dibentuk dalam rangka pengelolaan kolaborasi membentuk usaha produktif masyarakat berbasis komunitas menjadi berkembang dari bawah dan bersifat partisipatif. Kegiatan ini sangat produktif, tetapi memerlukan waktu yang cukup dan dalam mendorong kegiatan memerlukan intensitas komunitas yang tinggi dengan beragam pihak. Mekanisme yang berkembang selanjutnya adalah membentuk fleksibilitas melalui pembentukan jejaring (*network*) dengan beragam pihak. Jejaring ini kemudian dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, kejujuran, integrasi, dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan usahatani yang merupakan segmen masyarakat terbesar dan juga tertinggal. Jejaring

yang terbentuk dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Jejaring selanjutnya dibentuk dalam bentuk kerjasama antara lembaga pada tingkatan yang sama ataupun yang berbeda, yang berada ditingkat pusat dengan yang ada ditingkat propinsi, kabupaten, maupun komunitas.

4. Memelihara Jejaring Kolaborasi

Mengapa dikatakan jejaring? Konsepsi jejaring sebenarnya didasarkan pada pengertian *networking* sebagaimana sudah dijelaskan dalam konteks konsep modal sosial (*social capital*). Dalam konsep tersebut, ditunjukkan bahwa masyarakat dan kelompok-kelompoknya mempunyai modal sosial, dalam arti: norma-norma dan hubungan sosial yang melekat dalam struktur sosial setiap masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat tersebut mengkoordinasikan tindakannya dan mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Nilai tambah dari jejaring ini adalah mewujudkan kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Kembali kepada pembahasan pengalaman pengembangan kemitraan usaha, diperoleh pelajaran bahwa jejaring ini dapat menjadi sarana mengungkapkan persoalan-persoalan ditingkat komunitas dan juga menjadi sarana memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi proses penyelesaiannya sendiri atau melibatkan pihak lain diluar komunitasnya. Berdasarkan keadaan yang diinginkan masyarakat, pemecahan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dibahas dengan melibatkan lebih banyak pihak berkepentingan lainnya

(pemerintah daerah, lembaga usaha, dan lembaga bukan pemerintah), ditingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kabupaten. Jejaring ini kemudian dikembangkan menjadi kerjasama berbasis komunitas dengan tujuan yang lebih luas.

Gagasan ini kemudian mendapat sambutan dari sebuah departemen, yang memfasilitasi membentuk jaringan ditingkat pusat. Prinsip yang dikembangkan dalam jaringan kerjasama ini adalah; mereka yang terlibat mempunyai pengalaman beraktifitas ditingkat komunitas. Dalam kelembagaan kolaboratif ini hidup beragam kemitraan usaha, khususnya yang berkaitan dengan usahatani.

Dalam konteks pengembangan jejaring kolaborasi ini, kegiatan pertemuan dan interaksi antar pihak dilakukan dengan dasar pada hubungan *informal, yang mengutamakan proses yang setara (subject to subject), dan keikutsertaan yang dilandasi komitmen bersama*. Proses ini kemudian bermanfaat dalam mengembangkan *kesadaran kritis*. Dari beberapa kali pertemuan jejaring dirasakan mampu memperluas pendekatan birokratik dan menjadi media komunikasi horizontal antar pihak birokratik dan lembaga-lembaga non pemerintah, pengusaha swasta serta kalangan legislatif. Bahkan berbagai pihak dapat berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah ditingkat komunitas. Ini menjadi awal sinergi kegiatan antar pihak-pihak berkepentingan yang menjadi anggota jejaring.

Sesudah mengembangkan jejaring ditingkat pusat, selanjutnya jejaring dikembangkan di beberapa propinsi dan di beberapa kabupaten. Respon yang dikembangkan oleh *stakeholder* bervariasi antar tingkat dan antar lokasi. Meskipun demikian, jejaring yang dibentuk dikembangkan oleh *stakeholder* yang terlibat (umumnya terdiri dari pihak pemerintah, LPSM/LSM, lembaga usaha, lembaga legislatif) menjadi media untuk membangun komunikasi dan pertukaran informasi, menciptakan kerjasama, dan melakukan pengendalian sosial. Ini selanjutnya oleh para *stakeholder* yang terlibat disebut sebagai tujuan pembentukan jejaring.

Berdasarkan pengalaman yang dilakukan, ternyata pengembangan kemitraan usahatani dengan basis komunitas akan bermanfaat apabila berlanjut dengan pengembangan kawasan, demikian juga sebaliknya. Sinergi kegiatan antar *stakeholder* akan lebih dinamik apabila ada kebijakan kegiatan saling mengisi antara usaha di aras komunitas dengan kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengembangan prasarana kawasan. Tanpa ini, usaha kemitraan tidak dapat melibatkan lebih banyak komunitas. Proses ini masih berjalan, dan mungkin secara konseptual dapat digambarkan sebagai hubungan dialektis atau keseimbangan dinamis antara keduanya.

Jejaring menjadi sarana untuk membentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Hal lain yang dapat diambil dari pengalaman membentuk jejaring diberbagai tingkat dan lokasi, adalah membentuk

sinergi kegiatan. Dengan prinsip-prinsip kesetaraan, informal, partisipatif, membentuk komitmen maka masalah-masalah pengembangan kemitraan usaha berbasis komunitas dapat dibahas secara kritis dan masalah wujud diselesaikan secara sinergi. Jejaring yang digambarkan seperti jaringan laba-laba, seperti menjadi ikatan yang melintas dan memperkaya pendekatan birokratik mulai dari tingkat pusat hingga komunitas.

Meskipun, menawarkan berbagai kelebihan dibanding pendekatan birokratik, namun implementasi sinergitas kegiatan lapangan masih juga mengandung beberapa hambatan, terutama untuk memelihara kesinambungan jejaring ini. Kelemahan ini utamanya mengajak aparat pemerintah untuk melakukan praktek sinergi kegiatan tidak mudah. Kebanyakan aparat masih belum siap meninggalkan paradigma “proyek”. Selain itu, aparat masih takut berkreasi diluar kebiasaan yang dipraktekkan selama mereka bertugas. Sejauh ini masih perlu melacak bentuk-bentuk usaha ideal yang dapat mengembangkan komunitas dan sekaligus mengembangkan daerah.

Semangat membangkitkan peran masyarakat dalam membangun kemitraan merupakan modal positif dalam pembangunan pada masa mendatang. Meskipun demikian, semangat itu perlu terus dijaga ketulusannya. Dikhawatirkan, pengalaman selama tiga dekade melaksanakan “pendekatan proyek” dan terpusat dapat membayangi pelaksanaan ditingkat lapangan, sehingga gagasan mengikutsertakan masyarakat rentan kembali menjadi program birokratik dan teknokratik

yang menaklukkan masyarakat yang dibungkus label “pemberdayaan masyarakat”. Sebagaimana diketahui konsep sinergi bukanlah bermakna integrasi atau keterpaduan. Dalam kaitan konsepsi pembangunan yang tidak sentralistik, sinergi menunjukkan pada pengertian proses pengembangan secara bersama antara pihak yang mengandung dimensi keadilan (Blakely, 1989). Mengembangkan kemitraan melalui sinergi antar pihak tidak mungkin dapat diwujudkan dalam konteks pembangunan yang hanya mengutamakan pendekatan birokratik.

Pilar utama mensinergikan antara pengembangan kemitraan usahatani dengan ekonomi kawasan adalah dengan membentuk usaha masyarakat berbasis komunitas. Hal itu kemudian dijadikan usaha-usaha kemitraan usaha yang dikelola secara kolaborasi dengan jejaring antar pihak yang berkepentingan dalam konteks pengembangan usaha dan pembangunan yang lebih luas, seperti proses pengelolaan sumberdaya alam dalam satu kawasan. Implikasi lain dari pengembangan kolaborasi itu adalah pengelolaan kemitraan memerlukan muatan solidaritas moral semua pihak.

D. Manfaat Bermitra Dalam Usahatani

Harapan untuk meningkatkan taraf hidup para petani adalah dengan menyediakan kesempatan-kesempatan baru (*new opportunities*) dan dorongan atau rangsangan (*incentives*) untuk meningkatkan respon petani. Secara eksplisit dorongan atau rangsangan tersebut adalah dalam

hal tingkatan harga yang diterima para petani dari hasil produksinya dan tingkatan harga yang mereka bayar guna mendapatkan barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Dorongan atau rangsangan ini banyak mengalami distorsi yang cukup besar belakangan ini, sehingga banyak merugikan petani. Sebagai contoh didalam hal petani untuk memperoleh sarana produksi (misalnya pupuk), disamping susah, juga sering terjadi harga berada di atas harga yang ditetapkan. Sebaliknya hasil produksi, fluktuasi harga masih sangat besar. Distorsi-distorsi yang timbul dan merugikan petani disebabkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih menguntungkan masyarakat urban yang sebenarnya keuntungan tersebut diperoleh dari biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pedesaan, meskipun jumlah penduduk pedesaan yang hidup dari sektor pertanian lebih besar. Pengaruh kebijaksanaan yang lebih menguntungkan konsumen-konsumen urban dan sektor industri menyebabkan mereka dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang murah dengan bertumpu pada biaya yang dikeluarkan oleh sejumlah penduduk yang miskin.

Diskriminasi terhadap sektor pertanian berangkat dari pemikiran bahwa sektor pertanian intern dengan kemunduran (*backward*) dan kontribusinya yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Petani kebanyakan dipandang sebagai masyarakat yang acuh tak acuh terhadap dorongan atau rangsangan ekonomi (*economic incentives*) karena ketradisionalannya dalam usaha pertanian. Pembangunan industriliasasi

dipandang sebagai kunci kemajuan ekonomi. Pelaksanaan kebijaksanaan menempatkan sektor industri pada prioritas utama dengan menjaga atau mempertahankan harga produk pertanian utamanya pangan, tetap rendah. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa terjadilah ketimpangan ekonomi.

Hafsah (1999), mengemukakan bahwa kemitraan merupakan solusi ketimpangan ekonomi dimana terdapat beberapa manfaat kemitraan. Manfaat kemitraan yang dimaksud meliputi aspek produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, resiko, sosial serta ketahanan ekonomi sebagai berikut:

1. Produktivitas

Peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi perusahaan yang besar, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; pertama, tingkat produksi (*output*) yang diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi faktor input, misalnya target penjualan dapat dicapai dengan pengurangan tenaga kerja lapangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan menerapkan model pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*). Kedua, peningkatan produktivitas bagi perusahaan besar dilakukan dengan cara meningkatkan produksi (*output*) dengan menggunakan sumberdaya sendiri yang sama/tetap baik jumlah maupun kualitas.

Bagi perusahaan kecil atau petani secara individu peningkatan produktivitas biasanya dicapai secara simultan yaitu dengan cara

menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu tetapi akan memperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat.

2. Efisiensi

Efisiensi dan produktivitas sama halnya seperti mata uang dengan sisi yang berbeda keduanya dapat ditingkatkan dengan meminimalkan pengorbanan (input). Dalam hal ini efisiensi input tersebut dapat berbentuk waktu dan tenaga. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi. Dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.

3. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang biasa disingkat “tiga tas” sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya terjaminnya keuntungan perusahaan mitra “tiga tas” ini memerlukan manajemen yang mantap. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Selanjutnya perlu disertai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang jelas dan disiplin yang ketat. “Tiga tas” ini juga merupakan perekat

kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan kearah penyempurnaan.

4. Resiko

Setiap kegiatan bisnis/usaha selalu ada resiko. Bahkan suatu norma yang dianut oleh dunia usaha bahwa keuntungan/kesuksesan yang besar biasanya mengandung konsekuensi resiko yang besar pula. Dengan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (*risk sharing*). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh.

Resiko yang ditanggung bersama ini bukan hanya membagi resiko secara proporsional sehingga lebih ringan melalui risk sharing, mengandung makna yang lebih dalam yaitu senasib-sepenanggungan, eksistensi perusahaan yang bermitra menjadi besar, sehingga resiko berkurang menjadi lebih ringan lagi.

5. Sosial

Kondisi ideal perekonomian suatu negara apabila mayoritas aset produksi berada dan bergeser dilevel usaha kecil dan menengah. Karena dari level kecil dan menengah ini diharapkan dapat tumbuh suatu komunitas yang akan menjadi penggerak kemajuan suatu negara. Berdasarkan harapan ini dan melihat kondisi yang ada di Indonesia saat ini, makna program menumbuhkan pengusaha di tingkat kecil dan

menengah merupakan suatu terobosan yang strategis. Salah satu model penumbuhan pengusaha kelas kecil tersebut adalah dengan kemitraan.

Dengan kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (*sosial benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial yang biasa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan.

6. Ketahanan Ekonomi

Produktivitas, efektivitas dan efisiensi akan meningkat yang akhirnya akan bermuara pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan usaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi.

E. Karakteristik Petani

Menurut Soeharjo dan Patong (1986), keterampilan petani tidak sama. Ada petani yang memiliki keterampilan tinggi, tetapi ada pula yang memiliki keterampilan yang rendah. Adapula petani yang kritis berpikir dan mempunyai cita-cita tinggi untuk mengembangkan usahatani. Karakteristik petani yang berbeda tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendapatan petani.

Mengukur tingkat pendapatan petani melalui pola kemitraan tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani dalam mengelola usahataniya antara lain adalah:

1. Umur Petani

Potensi umur petani menjadi tolok ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas. Yasin (1981), mengungkapkan bahwa kematangan umur akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku baik formal maupun non formal. Batasan umur minimal dan maksimal akan menentukan kondisi dan kesehatan fisik seseorang terhadap pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rasyaf (1995), yang mengungkapkan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kerja seseorang. Umur antara 20 – 55 tahun merupakan umur yang masih produktif. Untuk umur dibawah 20 tahun merupakan umur yang belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai usia sekolah. Sedangkan umur diatas 55 tahun tingkat produktivitasnya telah melewati titik optimal dan akan menurun sejalan dengan penambahan umur. Dari segi efisiensi kerja biasanya pada golongan non produktif yang lebih sukar mengerjakan sesuatu secara baik dan maksimal. Kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat umur yang dapat dilihat dan diamati dari beberapa segi antara lain; lamban, kurang kreatif, sukar mengerti dan diarahkan, dan sebagainya. Pada tingkat usia tertentu kemampuan bekerja akan mengalami

penurunan sehingga produktivitas rendah dan tingkat pendapatan yang diperoleh akan menurun pula.

Umur petani sangat mempengaruhi kemampuan bekerja dan cara berpikir, sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap pengelolaan usahatani. Umumnya petani yang berumur produktif mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dan lebih giat mengadopsi teknologi dan informasi dibanding dengan petani yang tidak berumur produktif lagi. Tetapi petani yang berumur tua (tidak produktif) umumnya mempunyai pengalaman kerja yang banyak sehingga lebih matang dalam mengelola usahatani dan lebih berhati-hati dalam menghadapi teknologi dan informasi, meskipun kemampuan fisiknya sudah mulai menurun.

2. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan kerja petani. Hal tersebut terkait dengan bagaimana seseorang melihat potensi maupun peluang yang ada untuk mengembangkan usaha dan bagaimana dapat berpikir mengefisienkan penggunaan tenaga kerja serta biaya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Untuk meningkatkan dan menjamin keterampilan kerja petani agar semakin meningkat maka diperlukan pengembangan kualitas hidup melalui proses pendidikan dan latihan dengan beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

2. Tahap terlatih dan mampu bekerja, terampil, dan produktif sebagai tenaga profesional.
3. Tahap pengembangan diri melalui jalur kemampuan manajerial.
4. Tahap pengembangan kemampuan kreatif dan inovatif.

Keempat tahap tersebut perlu dilakukan karena keterampilan kerja seseorang tergantung pada proses pendidikan dan latihan yang didasarkan pada penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan yang mana dibutuhkan tenaga kerja terdidik, terlatih, profesional sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Keterampilan tenaga kerja yang produktif merupakan suatu hasil dari mata rantai pendidikan dan latihan (Martono, 1995).

Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemampuan kerja. Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yang dikemukakan oleh Simanjuntak (1985), bahwa asumsi dasar teori *human capital* adalah seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti terjadi peningkatan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang.

Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh terhadap pola pikir serta kemampuan seseorang dalam mengelola suatu usaha, dan bagaimana mereka dapat mengubah serta menerima setiap perubahan yang ada dan bagaimana menerapkannya.

Djamali (2000) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan sejalan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi kerja. Sedangkan menurut Gomes (2000) bahwa banyak dari penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor *knowledge* (ilmu pengetahuan, pendidikan), disamping beberapa faktor lainnya seperti *skill* (kecakapan, kepandaian, keterampilan), *abilities* (kemampuan, kecakapan), *attitudes* (sikap cara), dan *behaviors* (kelakuan).

Chaudri *dalam* Soekartawi (1988), menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana belajar yang memerlukan pengertian dan sikap yang menguntungkan menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih maju. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara pikir petani. Pendidikan yang relatif tinggi dan umur muda, mempengaruhi pola pikir petani yang lebih dinamis dalam pengembangan usahataniya untuk memperoleh hasil yang optimal dan pendapatan yang lebih menguntungkan.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga adalah keseluruhan anggota keluarga yang berada di dalam satu rumah yang terdiri dari kepala rumah tangga, isteri, anak-anak serta anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga.

Anggota keluarga sebagai tanggungan juga merupakan modal tenaga kerja dimana mereka akan ikut membantu dalam kegiatan

usahatani jagung kuning. Hal tersebut dapat sejalan karena pada umumnya tenaga kerja yang akan terlibat berasal dari anggota keluarga itu sendiri (Mangean, 2003).

Selain itu, jumlah anggota keluarga merupakan salah satu potensi yang sangat menentukan dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani. Mereka yang memiliki sedikit jumlah tanggungan keluarga akan lebih banyak mengalokasikan modal usahanya untuk menyediakan sarana produksi. Tetapi bagi petani yang memiliki banyak tanggungan keluarga, maka pengalokasian modal untuk penyediaan sarana produksi akan sangat terbatas sehingga harapan akan peningkatan produksi dan pendapatan petani kurang maksimal.

4. Luas Lahan

Lahan bagi seorang adalah hal yang sangat menentukan usahataniya. Jika tidak memiliki lahan maka petani akan sangat tergantung pada orang lain (pemilik tanah). Luas lahan dan status lahan selalu berhubungan positif dengan adopsi inovasi (Soekartawi, 1988). Lahan yang dimiliki oleh seorang petani dapat berupa sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan tegalan/lahan kering. Luas dan status lahan yang dimiliki akan mempengaruhi skala usaha dan skala usahatani, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja petani. Semakin luas lahan yang dimiliki dan merupakan pemilik lahan sendiri maka semakin besar skala usahatani yang dimiliki, berarti semakin tinggi tingkat pendapatan petani tersebut.

5. Pengalaman Berusahatani

Menurut Djamali (2000) bahwa tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama tentunya akan memberikan *performan* dan kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja baru.

Gomes (2000) mengemukakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh skill atau keterampilan sedangkan pengalaman seseorang dapat mendorong munculnya keterampilan sebab makin lama seseorang bekerja maka cenderung ia akan semakin terampil dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Pengalaman dapat diperoleh dari waktu kerja seiring dengan lamanya seseorang menggeluti pekerjaan tersebut.

Pengalaman berusahatani berkorelasi positif terhadap tingkat adopsi petani yang memiliki pengalaman. Berusahatani di atas 20 tahun lebih respon terhadap inovasi berusahatani dibandingkan dengan petani yang berpengalaman kurang dari 20 tahun (Kartawijaya,1995). Faktor pengalaman petani pulalah yang mempengaruhi seorang petani dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengembangan usahatannya, dengan selalu mempertimbangkan resiko yang akan diterimanya (Soeharjo dan Patong, 1986).

F. Analisis Keuntungan

Berusahatani sebagai suatu usaha untuk memperoleh hasil di lapangan pertanian pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan

dan penerimaan yang diperoleh dari selisih keduanya yang merupakan keuntungan (Soehardjo dan Patong, 1986).

Menurut Ibrahim (1986), biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan produsen untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan penunjang lainnya yang akan didayagunakan agar produk-produk tertentu yang akan direncanakan dapat terwujud dengan baik.

Biaya produksi dalam usahatani jagung kuning dapat dibagi dua, yakni biaya tetap atau *fixed cost* (FC) adalah biaya yang pada pengertian *Short run* yaitu biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah atau biaya yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi. Yang termasuk dalam biaya ini adalah penyusutan, tabungan modal, pajak dan reparasi rutin. Sedangkan biaya variabel atau *variabel cost* (VC) adalah biaya yang selalu berubah tergantung besar kecilnya produksi. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya pembelian bibit, obat-obatan, upah tenaga kerja dan sebagainya (Prawirokusumo, 1990).

Penerimaan adalah suatu keterkaitan produksi dimana terdapat suatu rantai yang sangat menentukan keseluruhan proses. Penerimaan adalah suatu variabel yang terdiri dari bermacam unit dan fungsi menentukan selisih antara output dan input yang telah dijalankan. Penerimaan ini dapat mewakili suatu selisih antara biaya produksi dan penentuan laba (Sukotjo, 1989).

Keuntungan secara ekonomis yang dapat diperoleh dari usahatani jagung kuning dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemanenan, pemipilan, pengeringan dan pemasaran yang baik.

Menurut Sukirno (1985), dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah dan penghapusan. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut diperoleh keuntungan.

Taksiran keuntungan untuk setiap harga apabila biaya berubah sejalan dengan perubahan volume, maka perusahaan menaksir banyaknya barang yang dapat dijual pada berbagai tingkat harga, juga pengaruh perusahaan dalam volume pada biaya produksi dan biaya penjualan, serta pengaruh besarnya harga, volume dan biaya pada keuntungan (Reksohadiprojo, 1996).

Reksohadiprojo, dkk (1992), menyatakan bahwa keuntungan merupakan landasan pokok yang mutlak harus ada agar perusahaan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Keuntungan dipergunakan perusahaan guna memberikan perlindungan terhadap kegiatannya didalam menghadapi berbagai resiko.

Soekartawi (1995) mengemukakan bahwa penerimaan adalah perkalian produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini

dapat dituliskan $TR = Y \cdot P_y$, dimana TR adalah total penerimaan, Y adalah produksi yang diperoleh dalam usahatani, dan P_y adalah harga. Sedangkan pendapatan (keuntungan) adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya dengan rumus $p = TR - TC$, dimana p adalah keuntungan (pendapatan), TR adalah total penerimaan dan TC adalah total biaya.

G. Kerangka Konseptual

Pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk didalamnya perkebunan merupakan bagian integral dari pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu harus memperhatikan aspek pelestarian sumberdaya alam. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus bertumpu pada keragaman potensi sumberdaya yang ada, misalnya lahan dan agroklimat yang sesuai dengan komoditi yang akan dikembangkan.

Pemberdayaan sumberdaya manusia disektor pertanian merupakan misi dari pembangunan pertanian yang dapat memanfaatkan sumberdaya perkebunan pada usahatani secara efisien. Oleh karena itu petani yang terlibat langsung dalam pengembangan usahatani harus selalu berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan efisien guna menjamin kelangsungan usahatani rakyat.

Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri jagung kuning menetapkan Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu daerah sentra produksi jagung kuning. Kabupaten

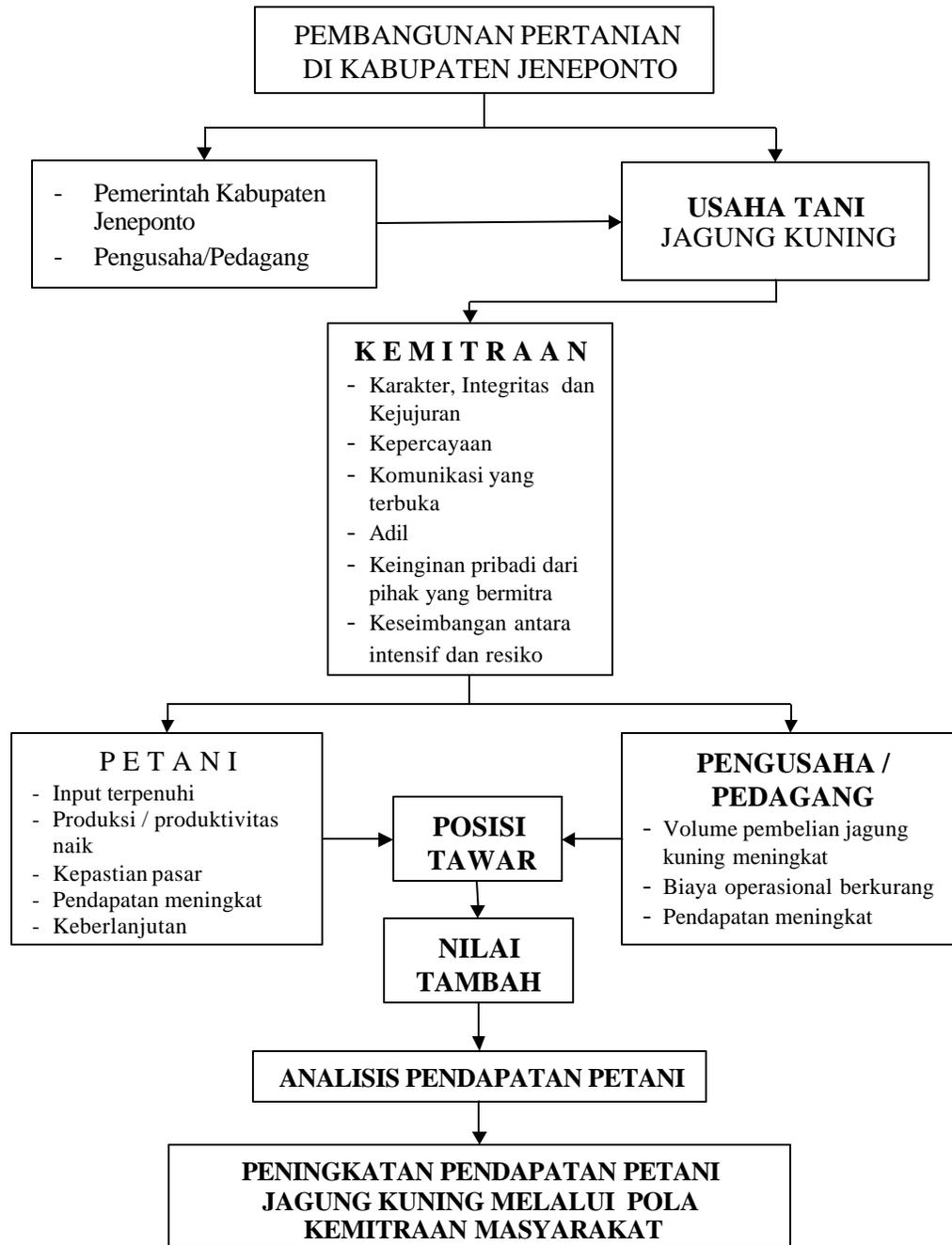
Jenepono dengan letak yang strategis dan kondisi agroekologi sangat menunjang program pengembangan produksi jagung kuning. Tanaman jagung kuning dalam program pengwilayahan komoditas di Kabupaten Jenepono menjadi salah satu komoditas unggulan disektor perkebunan. Begitu pula potensi sebagian penduduknya yang telah berpengalaman dalam mengusahakan tanaman jagung kuning.

Sasaran yang paling menyentuh langsung dan perlu mendapat perhatian adalah usaha peningkatan pendapatan petani. Prospek pengembangan jagung kuning dapat dilihat dari aspek pendapatan petani dengan berbagai implikasi pengembangannya. Namun demikian banyak masalah yang terkait dalam aspek pengembangan dimaksud, terutama aspek teknis dan sosial usahatani. Dalam berusahatani jagung kuning, petani selalu dalam posisi tawar yang lemah diantara subsistem sarana produksi dan subsistem pemasaran.

Salah satu upaya agar petani dapat terlepas dari posisi tawar yang lemah di antara subsistem sarana produksi dan subsistem pemasaran adalah dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha/pedagang, utamanya pengusaha/pedagang lokal. Dengan terjalinnya kemitraan antara petani dengan pengusaha/pedagang maka diharapkan akan memberikan nilai tambah dengan terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Usahatani pada komoditas jagung kuning diupayakan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui pendekatan pola kemitraan masyarakat. Untuk

mengetahui bagaimana pengaruh kemitraan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan petani jagung kuning di Kabupaten Jeneponto maka pendekatan analisis yang akan digunakan adalah pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi, kelembagaan, pemasaran, serta aspek daya dukung sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia.

Untuk lebih jelasnya maka secara skematis, kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian "Analisis Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Pola Kemitraan Masyarakat Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto"

H. Hipotesis

Dalam penelitian tesis ini hipotesisnya adalah terdapat perbedaan tingkat pendapatan petani jagung kuning sebelum dan sesudah bermitra. Faktor umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas garapan, pengalaman bertani dan pengalaman bermitra pada usahatani jagung kuning melalui pola kemitraan masyarakat berpengaruh kuat dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani jagung kuning di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

I. Definisi Operasional

Untuk menyeragamkan pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Jagung kuning adalah jagung pipilan kering yang berukuran sedang dengan bagian atas bulat, tidak berlekuk (seperti jagung jenis gigi kuda), dan hampir seluruhnya mengandung lapisan tepung yang keras, dan warna bijinya kuning, diukur dalam kilogram atau ton.
2. Petani adalah orang yang memiliki lahan jagung kuning dan mempekerjakan serta mengupah orang lain untuk penanaman hingga pemanenan jagung kuning selama satu musim tanam, diukur dalam jumlah orang.
3. Petani bermitra adalah yang melaksanakan usahatani jagung kuning dan telah menjalin kerjasama dengan pengusaha atau pedagang jagung kuning yang saling menguntungkan lebih dari satu tahun.

4. Pengusaha/pedagang adalah pengusaha/pedagang yang bergerak dibidang pengolahan/pemasaran jagung kuning yang telah melakukan kerjasama dengan petani.
5. Kemitraan adalah kerjasama antara petani jagung kuning atau kelompok taninya dengan pengusaha/pedagang jagung kuning disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Pola kemitraan adalah bentuk kemitraan yang sesuai sifat/kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif baik dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya.
7. Mekanisme pelaksanaan kemitraan masyarakat adalah mengenai pola kemitraan yang disepakati antara seorang petani/kelompok petani jagung kuning dengan pengusaha/pedagang yang meliputi penyediaan saprodi, produksi dan pemasaran, dalam kelemahan dan kelebihanannya.
8. Produksi jagung kuning adalah jumlah jagung kuning yang dihasilkan oleh petani selama satu kali musim tanam dan satu kali panen, diukur dalam kilogram atau ton.
9. Penerimaan adalah keseluruhan nilai produksi jagung kuning yang diusahakan petani (responden) dalam satu kali musim tanam, diukur dalam rupiah.

10. Total Biaya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani (responden) dalam usahatani jagung kuning pada satu kali musim panen, diukur dalam rupiah.
11. Pendapatan petani adalah keuntungan yang diperoleh oleh petani dari hasil produksi jagung kuning, diukur dalam rupiah.